
ETIKA POLITIK IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF 'AŞABIYYAH IBN KHALDUN

1. M. Agus Awalus Shoim

STIS Al Manar

makiina313@gmail.com

2. M. Syamsul Arif

Universitas Terbuka

rifummi@gmail.com

Abstract

Oppressive power arises from the absence of political ethics. In a democratic system, power originates from the people's support; therefore, when it turns oppressive, it contradicts the fundamental principles of democracy. Alongside oppression, identity politics emerges as a double-edged phenomenon—promoting social solidarity while potentially leading to social fragmentation. This study examines the relationship between power, ethics, and identity politics from the perspective of Ibn Khaldun's thought to uncover a philosophical foundation for the development of political ethics within the Islamic context. The research is qualitative in nature, employing a descriptive-analytical method and adopting Émile Durkheim's theory of social solidarity and Max Weber's theory of traditional authority as its analytical approaches. Through a literature-based examination of primary and secondary sources, this study analyzes how Ibn Khaldun's concept of 'aşabiyyah explains the interconnection between power, ethics, and social order. The findings show that power grounded in ethics generates constructive social relations. Political aims oriented toward the

acquisition of power remain legitimate as long as they are guided by ethical principles. Furthermore, identity politics can foster positive social cohesion when rooted in rationality, morality, and social order, as reflected in Ibn Khaldun's social philosophy.

Keywords: *Political Ethics, Power, Ibn Khaldun, Identity Politics.*

Abstrak

Kekuasaan yang menindas lahir dari ketiadaan etika politik. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan bersumber dari dukungan rakyat; karena itu, ketika ia berubah menjadi penindasan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Bersamaan dengan munculnya penindasan, politik identitas tampil sebagai fenomena bermuka dua—mendorong solidaritas sosial, namun berpotensi menimbulkan fragmentasi masyarakat. Penelitian ini menelaah relasi antara kekuasaan, etika, dan politik identitas dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun untuk menemukan dasar filosofis bagi pembentukan etika politik dalam konteks Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan teori solidaritas Émile Durkheim dan teori otoritas tradisional Max Weber. Melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep *ʿaṣabiyyah* Ibnu Khaldun menjelaskan keterkaitan antara kekuasaan, etika, dan tatanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan yang berlandaskan etika melahirkan relasi sosial yang konstruktif. Tujuan politik yang berorientasi pada perolehan kekuasaan tetap sah sejauh dibimbing oleh etika. Lebih jauh, politik identitas dapat menghasilkan kohesi sosial yang positif jika berakar pada rasionalitas, moralitas, dan tatanan sosial sebagaimana diajarkan dalam filsafat sosial Ibnu Khaldun.

Kata Kunci: *Etika Politik, Kekuasaan, Ibn Khaldun, Politik Identitas.*

Latar Belakang

Dalam perdebatan tentang Ibn Khaldun sebaiknya diawali dengan konsepnya terkait *ʿaṣabiyyah* yang melekat menjadi dalam kata-kata Kenneth Burke, “*God term*”-nya (Caron 1990). Namun sebaiknya kita

terlebih dahulu menempatkan konsep ini dalam frame kapasitas seluruh kesarjanaannya. Kemunculan politik etnis diawali dengan tumbuhnya kesadaran yang mengidentikan mereka kedalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu (Abdilah S. 2020). Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kelompok dan kebangsaan.

Secara etimologis, *‘aṣabiyyah* berasal dari kata *ashaba*, artinya mengikat. Secara fungsional, *‘aṣabiyyah* berarti ikatan sosial budaya digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial di atas dan di luar. *‘aṣabiyyah* juga dapat dipahami sebagai relasi sosial, menekankan solidaritas kesadaran, kohesi dan kesatuan kelompok (Rabie’ 1967). Kebangkitan identitas juga merupakan dampak perubahan identitas dalam proses interaksi antaretnik. Namun *‘aṣabiyyah* ini juga dapat berarti vitalitas suatu negara, yang artinya dapat mengukur kokohnya suatu negara dari kekerabatannya. Terbukti Ibn Khaldun bersikap idealis dalam hal ini.

Salah satu kajian terkini menyoal hubungan identitas dan polarisasi adalah tulisan Francis Fukuyama dalam buku berjudul *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*, diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 2018. Hal menarik dalam buku tersebut adalah gagasan Fukuyama mengenai konsep *Thymos*. *Thymos* adalah bagian dari jiwa manusia yang selalu haus pengakuan atas harga diri. Dahaga ini menjadi faktor penentu cara manusia memperjuangkan identitas diri dan kelompok, sekaligus menjadi pendorong fanatisme identitas suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Faktor *thymos* inilah yang menjadi akselerator polarisasi dalam masyarakat (Francis 2018).

Ibn Khaldun menyebutkan bahwa korupsi dan hedonisme yang terjadi dalam sebuah negara, dapat menjadi kelengahan dari serangan musuh, yang berarti *‘aṣabiyyah* besar lain seperti negara dapat menjajah atau mengambil alih negara dengan *‘aṣabiyyah* yang tengah melemah (Khaldun 2015, Çaksu 2017).

Menurut Machdani wacana Politik identitas merupakan kajian politik modern saat ini. Politik identitas adalah fenomena di mana individu atau

kelompok memobilisasi dukungan politik berdasarkan pada identitas sosial tertentu, seperti agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, atau kebangsaan. Hal ini bisa mencakup upaya untuk mengorganisir pemilih atau memperjuangkan kebijakan yang didasarkan pada identitas tersebut. Politik identitas sering kali menjadi faktor penting dalam pembentukan opini, pemilihan umum, dan kebijakan publik. Politik Identitas menjadi pembahasan politik yang perlu dieksplorasi. Gerakan politik identitas pada dasarnya adalah gerakan sosial politik, mereka terlibat dalam suatu kelompok dan membangun narasi melawan diskriminasi.

Dalam politik identitas, identitas sosial menjadi dasar bagi persepsi politik, solidaritas, dan tindakan politik (An-Naim n.d). Individu atau kelompok mungkin merasa bahwa kepentingan mereka secara kolektif terkait dengan identitas tertentu, dan oleh karena itu mereka bersatu untuk memperjuangkan kepentingan tersebut dalam ranah politik. Namun, politik identitas juga bisa memicu polarisasi, konflik, dan ketegangan sosial dalam masyarakat (Klinken & Nordholt 2007). Hal ini terutama terjadi ketika politik identitas digunakan untuk memperkuat perbedaan dan menekankan pembagian antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Pada perkembangannya kajian etika politik Islam diperlukan sebagai suatu cara pandang yang kritis terhadap politik sekuler barat yang menggunakan berbagai cara mendominasi agar berkuasa. Dalam masyarakat, keberadaan suatu kelompok yang dominan maka ia akan berkuasa dan mempengaruhi kehidupan. Paham politik sekuler barat mempengaruhi dunia, tapi bukan berarti umat Islam harus mengikutinya sistemnya (Azwar 2018).

Dalam etika politik Islam menurut Ibn Khaldun, kekuasaan politik memerlukan dukungan dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki solidaritas yang kuat. Ibn Khaldun berargumen bahwa stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan kekuasaan sangat tergantung pada sejauh mana kelompok-kelompok ini dapat menyatukan diri mereka dan mendukung struktur politik yang ada. Hal ini menyoroti pentingnya

kekuatan kelompok dalam mempertahankan kekuasaan, serta bagaimana legitimasi politik sering kali bergantung pada solidaritas sosial yang mendasarinya (Ahmad 2020). Ibn Khaldun menjadi rujukan mengenai sejarah dan politik Islam dengan karyanya yakni al-Mukadimah terkenal mengenai dasar-dasar pembentukan masyarakat. Ibn Khaldun membahas mengenai kekuasaan politik yang mendasari semua aktivitas manusia. Selain itu mengkaji moralitas dalam politik perspektif Ibn Khaldun. Mengenai moralitas politik sangat ditekankan Ibnu Khaldun (Black 2011).

Ibn Khaldun memiliki kecenderungan pembacaan terhadap masyarakat secara hermeneutika. Selain itu, Ibn Khaldun memahami bahwa etika atau akhlak bisa menjadi patokan praktik suatu kekuasaan dianggap baik dan bisa melakukan transformasi sosial, ekonomi yang bisa mengantarkan pada perbaikan hidup dan kualitas kesejahteraan masyarakat (Khaldun 2015). Di tengah masyarakat global atau multikulturalisme ini perlu menjaga solidaritas atas nama identitas keislaman untuk menjaga agama dan umat. Meskipun demikian perlu ada landasan rasional dalam berpolitik. Manusia memahami bahwa kekuasaan itu menjadi kekuatan politik yang bisa merubah suatu keadaan masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan secara banal maka akan menciptakan sesuatu yang tidak adil.

1. Bagaimana etika Politik identitas menurut menurut Ibn Khaldun?
2. Bagaimana memaknai politik identitas dalam teks dan konteks ‘*aṣabiyyah*’ Ibn Khaldun dalam memahami dinamika zaman?
3. Bagaimana hakikat kekuasaan menurut Ibn Khaldun?

Tinjauan Teoretis

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti karakter atau kebiasaan (Sudarminta 2013). Dalam bahasa Latin, kata ini diterjemahkan menjadi “ethica,” yang juga merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat. Seiring waktu, etika berkembang menjadi disiplin filsafat yang mempelajari moralitas, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku manusia.

Franz Magnis-Suseno memberi batasan tentang etika dengan mengatakan, etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan pikiranya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik (Suseno 1987). Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip dan teori mengenai perilaku baik dan buruk, benar dan salah. Ia berfungsi untuk memahami dan menganalisis berbagai teori moral serta prinsip-prinsip yang mendasari keputusan dan perilaku manusia (Sudarminta 2013). Etika berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang membuat suatu tindakan benar atau salah dan bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam situasi nyata. Merujuk pada cara-cara di mana ide, kebijakan, dan kekuasaan didiskusikan dan diperdebatkan dalam ruang publik. Diskursus politik merupakan kajian yang kompleks dan multidimensional, mencakup berbagai aspek dari cara komunikasi, bahasa, dan ideologi digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan politik serta kebijakan publik.

Dalam diskursus politik, bahasa memegang peranan penting. Pemilihan kata, frasa, dan gaya retorika yang digunakan oleh politisi, aktivis, dan media dapat membentuk persepsi publik dan mempengaruhi opini serta keputusan politik. Bahasa yang efektif dapat menggerakkan massa, memobilisasi dukungan, atau bahkan mengubah arah kebijakan.

Media dan komunikasi juga merupakan komponen penting dalam diskursus politik. Media massa, seperti surat kabar, televisi, dan terutama media sosial, memainkan peran sentral dalam menyebarkan informasi politik. Cara media melaporkan berita dapat sangat mempengaruhi pandangan politik masyarakat. Media sosial, khususnya, telah mengubah lanskap politik dengan memungkinkan informasi menyebar lebih cepat dan memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam diskusi politik.

Ideologi adalah aspek lain yang penting dalam diskursus politik. Ideologi seperti liberalisme, konservatisme, dan sosialisme menyediakan kerangka kerja bagi individu dan kelompok untuk memahami dan menilai dunia politik. Ideologi ini mempengaruhi bagaimana masalah-masalah politik ditafsirkan

dan bagaimana solusi diusulkan. Diskursus politik sering kali merupakan arena di mana ideologi-ideologi ini beradu dan berusaha untuk mendominasi pandangan public (Sa'adullah 2023).

Dalam mengartikan politik, Arendt lebih cenderung mengafirmasi Aristoteles yang menyatakan politik sebagai aktivitas *miteinander* (dialog, respiritas), yakni partisipasi semua warga dalam hidup bernegara, baginya politik adalah tindakan yang merupakan wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama (Fahmi 2022). Ibn Khaldun mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (*al-itjma' al-insani*) adalah merupakan keharusan. Karenanya, peradaban umat manusia itu tidak lepas dari organisasi masyarakat tersebut (Khaldun 2015).

Selain itu, ruang publik berfungsi sebagai sarana untuk partisipasi aktif dalam proses politik. Demonstrasi, rapat umum, dan petisi yang dilakukan di ruang publik memungkinkan warga negara untuk menyampaikan tuntutan atau pandangan mereka kepada pembuat kebijakan. Partisipasi ini esensial untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan publik. Keterlibatan langsung dalam ruang publik memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dan lembaga publik.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki dimensi politik dalam kehidupannya. Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik, di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi, orang yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakanya sebagai *en dam onia* atau *the good life* (Budiarjo 2008).

Ibn Khaldun juga menekankan pentingnya kerjasama, pembagian kerja, dan spesialisasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Baginya, negara memiliki peran vital dalam produksi melalui belanja publik yang dapat meningkatkan produksi dan melalui pajak yang dapat mempengaruhi produksi. Pemerintah yang aktif dalam belanja dapat mendukung

pembangunan ekonomi, sedangkan pajak yang rendah dapat mendorong aktivitas bisnis. Kerja sama dan pertolongan antar manusia biasanya hanya terjadi dalam situasi yang memaksa, karena kebanyakan orang tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kepentingan mereka. Selain itu, aktivitas- aktivitas yang mereka lakukan timbul berdasarkan kemampuan berpikir dan refleksi, bekerjasama dan bukan karena karakter natural semata (Khaldun 2011). Menurut Ibn Khaldun mengenai hal ini: “kekuasaan akan muncul bersama-sama *‘aṣabiyyah* dan anggota-anggota *‘aṣabiyyah* adalah pelindung yang akan terpencar di seluruh penjuru negara. Jadi apabila *‘aṣabiyyah* tersebut kuat maka negara tersebut akan lebih kuat dan luas (Khaldun 2000). Max Weber, sebagaimana dikutip Roderick Martin, memberikan definisi kekuasaan sebagai kemungkinan actor mewujudkan cita-citanya dalam komunitas manusia dengan kekuatan atau terlepas dari fondasi yang mendasari kemungkinan ini (Martin 1993).

Hakikat kekuasaan merupakan topik yang kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk filsafat, sosiologi, politik, dan psikologi. Kekuasaan bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan, perilaku, atau pemikiran orang lain. Berikut adalah beberapa konsep kunci terkait hakikat kekuasaan. Menurut Dahl, power identik dengan pengaruh, otoritas dan pemerintahan (Alfian 2009). Ada beberapa kata dalam Alquran yang bisa dijadikan kata kunci yang berkaitan dengan konsep kekuasaan. Kata-kata ini termasuk *al-hukm*, *as-sulthan*, dan *al-mulk*.

Metodologi Penelitian

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif-analisis. Mula-mula peneliti akan mendeskripsikan konten yang akan diteliti dengan maksud agar terlihat jelas, lalu pada tahap selanjutnya ialah menganalisa (dalam artian menimbang) poin-poin yang terdapat dalam persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan teori solidaritas Émile Durkheim dan teori otoritas tradisional Max Weber.

Jenis Penelitian

Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.

Data dan sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk data dan dua bentuk sumber data. Data bentuk pertama ialah data primer, yang dihasilkan dari pemikiran dari tokoh yang sedang dikaji dan berkiatan langsung dengan tema pemikiran yang dikaji, sedangkan bentuk kedua adalah data sekunder, yang dihasilkan dari pemikiran tokoh-tokoh lain dan tentunya masih berkaitan (dan mendukung), baik itu merupakan riset tokoh yang sedang dikaji maupun bukan. Adapun sumber data yang pertama disebut sebagai sumber data primer, yang artinya adalah karya-karya langsung dari tokoh yang sedang dikaji. Sedangkan yang sumber data kedua adalah karya yang ditulis oleh orang lain tentang tokoh yang sedang diteliti dan tentunya masih berkaitan, maupun karya yang bukan tentang tokoh yang sedang dikaji, namun tetap bersinggungan dengan tema yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah pencarian data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya. Pertama-tama peneliti akan mengakses buku-buku atau data-data primer yang dalam hal ini adalah karya dari tokoh yang sedang diteliti. Adapun tahap selanjutnya peneliti akan mencoba mencari data tambahan berupa data sekunder yang masih terkait dan relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

Pembahasan

Reinterpretasi etika politik Ibn Khaldun melibatkan kajian kembali dan penerapan prinsip-prinsip etika yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam konteks zaman modern dan situasi politik kontemporer. Ibn Khaldun, seorang pemikir besar dari abad ke-14, memberikan wawasan mendalam tentang dinamika sosial dan politik melalui karyanya, *Muqaddimah*.

Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menggambarkan *‘aṣabiyyah* sebagai solidaritas kelompok yang dapat berperan dalam pembentukan kekuatan politik. Terjemahan dan interpretasi modern seringkali melihat *‘aṣabiyyah* ini sebagai bentuk politik identitas, di mana loyalitas kelompok digunakan untuk mendukung tujuan politik (Khaldun 1981). Sistem pengetahuan juga berfungsi dalam konteks sosialnya, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan struktur masyarakat. Penerimaan dan penerapan pengetahuan dapat bervariasi tergantung pada struktur sosial dan institusi yang ada (Jabiri 2014).

Interpretasi Kontemporer konsep *‘ashābiyyah* yang ditekankan oleh Ibn Khaldun sebagai solidaritas sosial dapat diartikan ulang dalam konteks pluralisme modern dan masyarakat multikultural. Reinterpretasi ini bisa melibatkan penekanan pada pentingnya membangun solidaritas sosial yang inklusif, bukan hanya berdasarkan kesukuan atau kelompok etnis, tetapi juga mencakup keragaman identitas (Affandi 2004). Aplikasi modern menggunakan prinsip *‘aṣabiyyah* untuk mempromosikan kohesi sosial di masyarakat yang semakin beragam, dengan mendorong dialog antar kelompok dan membangun jaringan dukungan yang melampaui batas-batas identitas tradisional.

Pemikiran *‘aṣabiyyah* menurut Ibn Khaldun terkait erat dengan konsep politik identitas dan politik kebangsaan. “*‘aṣabiyyah*, atau solidaritas sosial, adalah konsep yang diperkenalkan oleh sejarawan dan filsuf Muslim, Ibn Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*. Dalam pandangannya, *‘aṣabiyyah* merujuk pada rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota kelompok sosial yang memiliki ikatan kultural atau identitas bersama, seperti suku atau kelompok etnis.

Dalam konteks politik identitas, *‘aṣabiyyah* dapat dihubungkan dengan bagaimana kelompok-kelompok sosial yang memiliki identitas spesifik membentuk solidaritas dan dukungan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Politik identitas seringkali menyoroti pentingnya *‘aṣabiyyah* dalam meningkatkan kekuatan dan posisi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau terancam.

Di sisi lain, politik kebangsaan dapat dikaitkan dengan *‘aṣabiyyah* dalam bentuk solidaritas yang lebih luas, yang melampaui perbedaan identitas individu atau kelompok untuk membentuk kohesi sosial dan persatuan nasional. Ibn Khaldun berpendapat bahwa suatu masyarakat yang memiliki tingkat *‘aṣabiyyah* yang tinggi cenderung lebih stabil dan berhasil dalam membangun negara, karena solidaritas ini memperkuat kemampuan kelompok untuk menghadapi tantangan dan menjaga kestabilan sosial. Dengan demikian, politik kebangsaan bisa dilihat sebagai upaya membangun *‘aṣabiyyah* di tingkat yang lebih besar, mengintegrasikan berbagai kelompok dalam satu identitas nasional yang koheren.

Interpretasi Kontemporer teori siklus dinasti Ibn Khaldun, yang menggambarkan naik turunnya kekuasaan politik, dapat diperluas untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam konteks globalisasi dan sistem pemerintahan modern yang melibatkan pemahaman tentang bagaimana kekuatan politik berubah dalam era demokrasi, globalisasi, dan teknologi (Maarif 1996). Aplikasi Modern menerapkan prinsip siklus dinasti untuk menilai kestabilan politik dalam sistem pemerintahan modern dan menganalisis bagaimana kekuatan politik beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi (Pulungan 1996).

Wacana Politik Identitas

Boleh tidaknya sebuah kelompok menggunakan politik identitas, atau apa kaitan antara politik identitas dengan politik praktis. Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu

kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras atau idiologi kelompok.

Politik identitas tidak hanya terjadi pada kelompok mayoritas, tetapi juga bisa melibatkan kelompok minoritas yang berusaha memperjuangkan pengakuan atas identitas dan hak-hak mereka dalam masyarakat (Kalyvas 1996). Meski sah dan penting bagi kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak-haknya, ada kasus di mana upaya tersebut dilihat sebagai tindakan yang memaksakan identitas mereka terhadap masyarakat yang lebih luas, terutama ketika tuntutan ini dianggap bertentangan dengan norma-norma mayoritas (Madood & Meer 2007). Legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan berkaitan dengan cara kekuasaan diperoleh dan diterima oleh masyarakat (Asshiddiqie 2021).

Salah satu contoh yang sering muncul adalah kasus (*identity politics*), kemudian menggring kontroversi mengenai penolakan pendirian rumah ibadah oleh kelompok minoritas di daerah yang mayoritas penduduknya memiliki keyakinan berbeda. Di beberapa wilayah di Indonesia, pendirian gereja atau tempat ibadah minoritas lainnya sering menghadapi penolakan dari masyarakat mayoritas setempat, yang merasa bahwa keberadaan tempat ibadah tersebut dapat mengganggu harmoni sosial atau bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mayoritas (Heryanto 2006). Meskipun kelompok minoritas berhak untuk mendirikan rumah ibadah berdasarkan hukum, penolakan ini mencerminkan ketegangan yang bisa terjadi ketika identitas minoritas dianggap memaksakan diri di tengah masyarakat mayoritas.

Kontroversi terkait politik identitas sebenarnya berawal dari perbedaan dalam memahami konsep dan menempatkan konteks. Konteks ini mencakup konteks ruang, waktu, dan kondisi yang melatari. Sebagai suatu konsep, politik identitas tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, sebab kontekslah yang bisa menjadi acuan pemaknaan dan pemahaman atas suatu konsep. Dengan demikian, mengabaikan konteks dari konsep politik identitas sama saja dengan melahirkan pemahaman baru yang keliru dan sesat terhadap konsep tersebut (Liliweri 2017). Politik yang mengarah

pada etnis cenderung dijadikan sebagai alat oleh pelaku diarena politik untuk mencapai kekuasaan secara struktural dimanfaatkan pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui identitas etnis serta diciptakan untuk memenangkan pertarungan.

Dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, politik identitas dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik. Ia menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai mereknya. Tujuan ideal politik dalam masyarakat adalah menciptakan sebuah lingkungan di mana kesejahteraan dan keadilan dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat (Nussbaum 2011).

Perpecahan yang timbul akibat *‘aṣabiyyah* tertutup dapat diatasi dengan beberapa pendekatan yang fokus pada peningkatan keterbukaan dan integrasi sosial. Salah satu langkah utama adalah mendorong keterbukaan dan dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda. Melalui diskusi yang konstruktif, berbagai pihak dapat berbagi perspektif mereka dan mencari solusi bersama. Dialog yang inklusif membantu mengurangi ketidakpahaman dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok, yang pada akhirnya dapat mengurangi perpecahan.

Pemikiran Ibn Khaldun mengenai etika politik Islam didasarkan pada konsep moralitas, keadilan, dan kohesi sosial yang ia sebut sebagai *‘aṣabiyyah*. Dalam pandangannya, *‘aṣabiyyah* merupakan fondasi utama bagi sebuah masyarakat atau negara. Kohesi sosial yang kuat adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang stabil dan efektif. Ibn Khaldun percaya bahwa kekuatan *‘aṣabiyyah* dapat menjaga keutuhan negara, sementara lemahnya *‘aṣabiyyah* sering menjadi penyebab runtuhnya sebuah dinasti. Oleh karena itu, etika politik yang Islami menurut Ibn Khaldun menekankan dalam menjaga kestabilan Negara (Fromherz 2011).

Ibn Khaldun juga melihat hubungan erat antara agama dan politik dalam Islam. Bagi Ibn Khaldun, Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi

juga sebagai kerangka moral dan hukum yang harus diikuti oleh negara (Fromherz 2011). Hukum Syariah, sebagai landasan hukum dalam pemerintahan, dianggap sebagai cara untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Penerapan hukum yang adil menurut prinsip-prinsip Islam akan memastikan kelangsungan sebuah negara.

Pendapat Pemikir Barat dalam Politik Identitas

Émile Durkheim, sosiolog Prancis abad ke-19, mengembangkan teori tentang solidaritas sosial yang memiliki kesamaan dengan *‘aṣabiyyah*. Durkheim membedakan antara solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat tradisional yang homogen, di mana individu terikat oleh kesamaan nilai, kepercayaan, dan norma. Ikatan ini mirip dengan *‘aṣabiyyah* Ibn Khaldun, di mana kohesi sosial didasarkan pada identitas bersama dan kesetiaan kelompok. Solidaritas organik terjadi dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana diferensiasi pekerjaan dan peran menciptakan ketergantungan antar individu. Meskipun berbeda dari *‘aṣabiyyah*, konsep ini tetap menekankan pentingnya kohesi sosial untuk stabilitas masyarakat.

Max Weber, sosiolog Jerman, memperkenalkan konsep otoritas tradisional, yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan berdasarkan adat dan tradisi. Konsep ini sejalan dengan *‘aṣabiyyah* Ibn Khaldun, di mana kekuasaan sering kali didasarkan pada ikatan kekerabatan dan solidaritas kelompok. Weber juga menekankan peran nilai-nilai budaya dan agama dalam membentuk struktur sosial dan politik, yang relevan dengan pandangan Ibn Khaldun tentang pengaruh agama dalam memperkuat *‘aṣabiyyah*. Meskipun Durkheim dan Weber tidak secara langsung merujuk pada karya Ibn Khaldun, konsep mereka tentang solidaritas sosial dan otoritas tradisional menunjukkan adanya paralel dengan teori *‘aṣabiyyah*. Hal ini mencerminkan pemahaman universal tentang pentingnya ikatan sosial dalam membentuk dan memelihara struktur masyarakat.

Max Weber dan Émile Durkheim adalah dua sosiolog terkemuka yang, meskipun tidak secara langsung membahas konsep *‘aṣabiyyah*

yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, menawarkan analisis yang relevan mengenai bagaimana identitas kelompok dan solidaritas sosial mempengaruhi dinamika politik dalam masyarakat. Weber memperkenalkan konsep stratifikasi sosial yang terdiri dari tiga komponen utama: kelas sosial, status sosial, dan partai politik. Kelas sosial ditentukan oleh hubungan ekonomi individu dengan pasar, status sosial berkaitan dengan kehormatan dan prestise yang tidak selalu berhubungan dengan ekonomi, dan partai politik mencerminkan afiliasi dalam domain politik. Pembagian ini menunjukkan bahwa identitas individu dalam masyarakat modern kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, budaya, dan politik.

Dalam analisisnya tentang otoritas, Weber mengidentifikasi tiga tipe ideal: otoritas karismatik, tradisional, dan rasional-legal. Otoritas tradisional, misalnya, didasarkan pada kepercayaan terhadap adat dan tradisi yang telah berlangsung lama, yang sering kali terkait dengan identitas kelompok tertentu. Sementara itu, otoritas rasional-legal berakar pada sistem hukum dan peraturan yang impersonal, mencerminkan rasionalisasi masyarakat modern. Analisis Weber tentang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling efisien dalam masyarakat modern juga menyoroti bagaimana struktur formal dapat mempengaruhi identitas individu dan kelompok dalam konteks politik.

Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga kohesi dan stabilitas masyarakat. Ia membedakan antara solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat tradisional yang homogen, di mana individu terikat oleh kesamaan nilai, kepercayaan, dan norma. Ikatan ini mirip dengan konsep *'aṣabiyyah* Ibn Khaldun, di mana kohesi sosial didasarkan pada identitas bersama dan kesetiaan kelompok. Sebaliknya, solidaritas organik muncul dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana diferensiasi pekerjaan dan peran menciptakan ketergantungan antarindividu. Meskipun berbeda dari *'aṣabiyyah*, konsep ini tetap menekankan pentingnya kohesi sosial untuk stabilitas masyarakat.

Durkheim juga memperkenalkan konsep “fakta sosial” (*social facts*), yang merujuk pada norma, nilai, dan struktur sosial yang berada di luar individu tetapi mempengaruhi perilaku mereka. Fakta sosial ini membentuk identitas individu dalam konteks sosial dan politik, dan dapat dibandingkan dengan pengaruh *‘aṣabiyyah* dalam membentuk perilaku kelompok dan dinamika politik dalam masyarakat yang dianalisis oleh Ibn Khaldun.

Meskipun Weber dan Durkheim tidak secara langsung membahas konsep *‘aṣabiyyah*, analisis mereka tentang identitas kelompok, solidaritas sosial, dan struktur otoritas memberikan kerangka kerja yang membantu memahami bagaimana ikatan kelompok dan identitas kolektif mempengaruhi dinamika politik. Konsep *‘aṣabiyyah* Ibn Khaldun menekankan pentingnya solidaritas kelompok dalam pembentukan dan kejatuhan dinasti serta peradaban, yang sejalan dengan analisis Durkheim tentang solidaritas sosial dan Weber tentang otoritas tradisional. Dengan demikian, meskipun berasal dari konteks dan tradisi intelektual yang berbeda, pemikiran Weber dan Durkheim dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang peran identitas kelompok dan solidaritas sosial dalam politik, sebagaimana yang digambarkan oleh konsep *‘aṣabiyyah* Ibn Khaldun.

Kesimpulan

Etika *‘aṣabiyyah* menurut Ibn Khaldun berkaitan erat dengan politik dan identitas kelompok. *‘aṣabiyyah* adalah konsep solidaritas kelompok atau loyalitas kelompok yang dianggap sebagai pendorong utama dalam perkembangan sosial dan politik. Ibn Khaldun menekankan bahwa *‘aṣabiyyah* sangat penting dalam pembentukan dan stabilitas negara, karena ia menggerakkan masyarakat untuk bersatu dan mendukung pemimpin mereka. Pentingnya solidaritas yang dilandasi moralitas dan keadilan. Pentingnya etika *‘aṣabiyyah* menurut Ibn Khaldun juga membawa implikasi moral. Jika digunakan secara positif, *‘aṣabiyyah* dapat menciptakan stabilitas dan kemajuan. Tetapi jika digunakan secara

berlebihan atau eksklusif, ia dapat menyebabkan konflik, ketidakadilan, terutama ketika solidaritas ini digunakan untuk menindas kelompok lain atau mempertahankan kekuasaan secara tidak adil (Khalidun 2005).

Dalam politik dan identitas kelompok, Ibn Khaldun melihat *'aṣabiyyah* sebagai kekuatan yang dapat membawa kebaikan, tergantung pada bagaimana ia diterapkan. Etika adalah alat ukurnya dalam penggunaan *'aṣabiyyah* harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kelompok dan keadilan sosial yang lebih luas. Ibn Khaldun, seorang pemikir besar dari dunia Islam abad ke-14, memperkenalkan konsep *'aṣabiyyah* dalam karyanya *Muqaddimah*, yang telah menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika sosial, politik, dan identitas kelompok. *'aṣabiyyah* mengacu pada semangat solidaritas kelompok, suatu kekuatan yang mengikat anggota masyarakat bersama-sama dan membentuk dasar bagi identitas kolektif mereka. Dalam pandangan Ibn Khaldun, *'aṣabiyyah* adalah kekuatan mendasar yang menentukan nasib peradaban, baik dalam pembentukannya, perkembangan, maupun kemundurannya.

Dalam konteks politik, *'aṣabiyyah* memainkan peran sentral dalam pembentukan dan keberlanjutan kekuasaan. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki *'aṣabiyyah* yang kuat lebih mampu membangun negara atau dinasti yang stabil dan kokoh. Solidaritas ini menciptakan loyalitas dan komitmen yang tinggi di antara anggota kelompok, yang pada gilirannya memperkuat otoritas pemimpin dan memungkinkan penguasa untuk mengendalikan wilayah mereka dengan efektif. Dalam sejarah, banyak dinasti besar yang pada awalnya dibangun di atas semangat *'aṣabiyyah*, di mana para pemimpin menggunakan dukungan kolektif dari kelompok mereka untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya.

Ibn Khaldun juga memperingatkan tentang sifat sementara dari *'aṣabiyyah*. Ia mencatat bahwa seiring waktu, kekuatan *'aṣabiyyah* cenderung melemah, terutama ketika kelompok tersebut menjadi lebih mapan dan mulai menikmati kemewahan kekuasaan. Ketika *'aṣabiyyah* melemah, negara atau dinasti yang dibangun di atasnya mulai

mengalami kemerosotan (Khaldun 1967). Inilah yang menyebabkan siklus pembentukan, kemajuan, dan kemunduran dalam sejarah peradaban manusia *ʿaṣabiyyah* menurut Ibn Khaldun. Ketika semangat solidaritas dan kesatuan kelompok memudar, muncul konflik internal dan ketidakstabilan yang akhirnya membawa keruntuhan (Khaldun 2004).

Etika dan alam pandangan Ibn Khaldun menjadi modal rujukan; ia tidak melihatnya sebagai intrinsik baik atau buruk. *ʿaṣabiyyah* adalah kekuatan alami yang dapat membawa stabilitas atau ketidakstabilan, tergantung pada bagaimana ia dikelola. Ketika digunakan secara bijaksana, *ʿaṣabiyyah* dapat menjadi dasar bagi persatuan, kekuatan, dan kemajuan. Namun, jika disalahgunakan atau dibiarkan berkembang tanpa pengendalian, Ibn Khaldun menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan bijaksana dalam memelihara keseimbangan dalam masyarakat.

Hubungan antara *ʿaṣabiyyah* dan identitas kelompok juga sangat penting dalam pemikiran Ibn Khaldun. Identitas kelompok terbentuk dan diperkuat melalui *ʿaṣabiyyah*, yang memberikan rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Namun, identitas ini bukanlah sesuatu yang statis, ia bisa berubah seiring waktu, terutama ketika kelompok tersebut berinteraksi dengan kelompok lain yang memiliki *ʿaṣabiyyah* yang lebih kuat. Dalam pandangan Ibn Khaldun, perubahan dalam *ʿaṣabiyyah* dan identitas adalah bagian dari dinamika sosial yang tak terhindarkan, dan ini adalah salah satu alasan mengapa peradaban terus berkembang dan berubah sepanjang sejarah.

Secara keseluruhan, konsep *ʿaṣabiyyah* menurut Ibn Khaldun adalah lensa penting untuk memahami bagaimana kelompok manusia membangun, mempertahankan, *ʿaṣabiyyah* adalah kekuatan penggerak yang dapat menciptakan stabilitas dan kemajuan, tetapi juga bisa menjadi penyebab kemunduran jika tidak dikelola dengan bijaksana.

References

- Ahmad, H. Zainal Abidin. 2014. *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Ahmad Suhelmi. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Afala, La Ode Machdani. *Politik Identitas di Indonesia Edisi Revisi*. 2020. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Afifudin, Mohammad. 2021. *Partitokrasi: Sehimpun Esai Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Anwar, Rosihon dan Abdul Rozak. 2002. *Kamus Istilah Teologi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Azra, Azyumardi. 2016. *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Berry, Mike. 2017. *Morality and Power On Ethics, Economics and Public Policy*. Massachusetts: Edward Elgar.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- . 2002. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Black, Antony. 2020. *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 1995. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia.
- Burleigh, Michael and Wolfgang Ippermann. *Racial State Germany 1933-1945*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre. 2020. *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik*. Yogyakarta: IRCISOD.
- Caton, Steven C. 1990. "Anthropological Theories of Tribe and State Formation in the Middle East: Ideology and the Semiotics of Power." In Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, eds. *Tribes and State Formation in the Middle East*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Fakhry, Majid. 1996. *Etika Islam*. Terj. Zakiyuddin Baidhawiy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frueh, Jamie. 2012. "Political Identity and Social Change: The Remaking of the South African Social Order." New York: State University of New York Press.

- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. 2021. *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Jawa Tengah: NEM.
- Haryatmoko. 2012. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Herdiansyah, Heris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hersh, Eitan. 2020. *Politics Is for Power How to Move Beyond Political Hobbyism, Take Action, and Make Real Change*. New York: Scribner.
- Hudgson, Marshall G. 2004. *Venture of Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. 1967. *Ibn Khaldun: The Muqaddimah An Introduction to History*. 3 vols., trans. Franz Rosenthal. London: Routledge and Kegan Paul.
- . 2000 *Mukaddimah*. Ter. Ahmad Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kelsen, Hans. 2019. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia.
- Kertanegara, Mulyadhi. 2006. *Menyelami Lubuk Tasawuf*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Khalidi, Tarif. 1994. *Arabic Historical Thought in the Classical Period*. New York: Cambridge University Press.
- Kholis, Nur. 2018. "Meta Analisis Pendekatan Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx dalam Pendidikan." *Jurnal Al-Tahrir*, 18 (1), 123-140.
- Khudhairi, Zainab. 1987. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Ter. Ahmad Rafi. Bandung: Pustaka.
- Lahbari, Mohamed-aziz. 1968. *Ibn khaldūn, présentation, choix de textes, bibliographie*. Prancis: Seghers.
- Leaman, Oliver. 2001. *Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis*. Translated by Musa Kazhim dan Arif Mulyadi. Bandung: Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Magnis-Suseno, Franz. 2005. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

- . 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- McHoul, Alec and Wendy Grace. 2015. *A Foucault Primer Discourse, Power, and the Subject*. London: Routledge.
- Narbkuko, Cholid, dan H. Abu Achmadadi. 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Nasyi'at, Ali M. 1944. *Al-Fikr al-Iqtishadi fi Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kairo.
- Poespoprodjo. 1999. *Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Rahman, Fazlur. 1985. *Islam & Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin, Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Rasunto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas; Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salam, Burhanuddin. 2000. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shadr, M. Baqir. 2010. *Paradigma dan Kecenderungan Sejarah dalam Al-Qur'an: Sebuah Konstruksi Filsafat Sejarah*. Jakarta: Sadra Press.
- . 1987. *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Thabathaba'i, Muhammad Husain. 1992. *Inilah Islam: Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Tjahjadi, S.P. Lili. 1991. *Hukum Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Weber, Max. 2002. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Penguin Books.
- Yastribi, Sayyid Yahya. 2012. *Agama dan Irfan: Wahdat Al-Wujud dalam Ontologi dan Antropologi, Serta Bahasa Agama*. Jakarta: Sadra Press.